

## Mukernas PKB Bahas Kemungkinan Gabung ke Prabowo

JAKARTA (KR) - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan, musyawarah kerja nasional (mukernas) partainya membahas sikap bergabung dengan pemerintahan 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Itu termasuk akan dibahas," katanya saat memberikan keterangan di Balai Sidang Jakarta (JCC), Jakarta, Selasa (23/7).

Cak Imin menjelaskan, Mukernas PKB akan membahas agenda internal dan eksternal partai.

"Eksternal itu antara lain bagaimana cara kerjanya legislatif dan eksekutif agar relevansi mengatasi persoalan masyarakat. Hal itu bisa diimplementasikan di dalam undang-undang, peraturan daerah dan peraturan-peraturan yang diproduksi legislatif," ujarnya.

Diungkapkan Muhaimin, perekonomian nasional turut dibahas dalam mukernas partainya. Menurutnya, perekonomian nasional saat ini bergantung pada impor. "Saya berharap mukernas ini merumuskan supaya kami titipkan terhadap peme-

rintahan yang baru agar frame ekonominya berdasarkan ekonomi Pancasila," jelasnya.

Ia mengatakan, mukernas turut mengevaluasi terjadinya politik uang di Tanah Air.

"Selain sistem pemerintahan dan tata negara serta pembangunan, ada politik dan politik itu agenda yang agak mendesak adalah pembenahan sistem politik. Tentu nanti akan kami diskusikan bagaimana UU Pemilu, UU Partai, semua UU kami rekomendasikan untuk dievaluasi," papar Cak Imin.

(Ant)-f



Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) menata barang bukti kasus laboratorium rahasia (clandestine lab) narkotika saat konferensi pers di sebuah vila di Kawasan Desa Kelusa, Gianyar, Bali, Selasa (23/7/2024).

### SASARAN PEREDARAN GELAP INTERNASIONAL

# Lab Narkotika Rahasia di Bali Terungkap

BALI (KR) - Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Komjen Pol Marthinus Hukom menyatakan, pengungkapan kasus laboratorium narkotika rahasia di Bali merupakan 'alarm' (peringatan) bagi Bali bahwa Pulau Dewata menjadi sasaran peredaran gelap narkotika tingkat dunia.

Di Gianyar, Bali, Selasa (23/7), Martinus menyatakan, peringatan itu penting dan mendesak, mengingat sudah ada dua kasus laboratorium narkotika yang dikendalikan warga negara asing (WNA) di Bali dalam setengah tahun 2024.

Pertama, kasus laboratorium narkotika yang diungkap Bareskrim Polri di Kawasan Tibubeneng, Kabupaten Badung, Bali yang dikendalikan oleh WNA Rusia dan Ukraina. Kedua, laboratorium narkotika rahasia di

Jalan Desa Keliki Kawan, Kecamatan Payangan, Gianyar yang dikendalikan oleh WNA Filipina dan Yordania.

"Temuan-temuan kasus ini, tidak boleh kita anggap sebagai gejala biasa, tetapi ini adalah alarm atau peringatan bahaya bahwa Bali dan bisa jadi wilayah Indonesia lainnya merupakan sasaran tempat produksi gelap narkotika yang dianggap aman bagi jaringan narkotika internasional," katanya.

Hukom mengatakan, pengungkapan laboratorium narkotika Golongan 1 Dimethyltryptamine (DMT) menunjukkan bahwa jaringan narkotika internasional, tidak saja mengirim narkotika dari luar negeri, tetapi mereka telah masuk dan menyerang dari jantung pertahanan dalam negeri, terutama di sentra pariwisata.

Bali adalah wilayah khusus, wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Menurutnya, Bali yang merupakan kawasan tujuan wisata internasional sekaligus sebagai penghubung bertemunya beragam orang dari berbagai belahan dunia, pada satu sisi keindahan alam dan budaya Bali adalah kekayaan alam yang menjadi daya

tarik dan memiliki potensi keunggulan, namun juga memberikan tantangan tersendiri.

Meski demikian, tegasnya, penegak hukum tidak akan pernah diam untuk melakukan deteksi terhadap para warga negara asing yang mencoba membawa gagasan kejahatan ke Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, penggiat pariwisata untuk membangun kesadaran bersama bahwa wisata dan hiburan adalah bentuk kesenangan jiwa dan menjadi tuntutan, namun juga harus bisa menekan berbagai bentuk keinginan dan kesenangan semu melalui berbagai stimulan yang mengarahkan pada kerusakan fisik mental dan moral.

"Bali yang menjadi daerah favorit

kunjungan wisata mancanegara harus kita lindungi bersama, tidak boleh ada pelanggaran hukum yang kita biarkan termasuk pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan warga negara asing," katanya. Apalagi, pelanggaran terhadap tingkat pidana-kegiatan serius seperti narkotika.

Mantan Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri itu menyatakan, pengungkapan kasus pabrik narkotika di Bali menunjukkan Bali dianggap sebagai area pasar narkoba jenis apapun.

"Bukan hanya sabu, ekstasi atau ganja. Namun, Bali adalah pasar heroin dan kokain dan ke depan kita menjadi pasar narkotika DMT seperti yang kita saksikan hari ini," katanya.

(Ant/San)-d

### UJI MATERI UU TENTANG TAPERA

## Pemohon Ingin Peserta Daftar Sukarela

JAKARTA (KR) - Pemohon uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ingin Mahkamah Konstitusi (MK) mengatur ketentuan agar yang dimaksud dengan peserta Tapera adalah orang-orang yang mendaftar secara sukarela. Pemohon yang merupakan pekerja lepas (freelancer) bernama Bansawan ini menggugat Pasal 1 angka 3 dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Tapera karena dinilai melanggar hak konstitusional jika nantinya diberlakukan.

"Pemohon sebagai anak bangsa yang memiliki cita-cita luhur yang berusia relatif muda berkeinginan ikut berkontribusi dalam perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Namun, tidak ingin juga hak konstitusi pemohon dilanggar," ucap kuasa hukum Bansawan, Ferdian Susanto, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Ruang Sidang Pleno MK Jakarta, Selasa (23/7).

Menurut pemohon, uang hasil jerih

payahnya bekerja akan wajib diberikan kepada negara apabila Pasal 1 angka 3 dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Tapera mulai diberlakukan. Padahal, tabungan merupakan sebuah pilihan, bukan kewajiban. "Pemohon setuju dengan berlakunya Pasal 1 angka 3 dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Tapera asalkan dengan keinginannya sendiri secara sukarela," sambung Ferdian.

Pemohon mendalilkan pasal yang digugat tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. "Untuk melindungi konstitusi pemohon agar tidak dilanggar dan melahirkan adanya jaminan kepastian hukum dan keadilan, maka pemohon dalam menguji Pasal 1 angka 3 dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Tapera terhadap UUD NRI 1945 adalah sangat mendesak," tambah kuasa hukum pemohon, Laura Donna Maria.

(Ant/Has)-f

### DUGAAN LAPORAN PALSU KASUS VINA

## Polri Gelar Perkara Awal

JAKARTA (KR) - Direktorat Tindak Pidana Umum (Ditpidum) Bareskrim Polri, Selasa (23/7) melaksanakan gelar perkara awal untuk laporan soal kesaksian palsu yang disampaikan saksi Aep dan Dede. Laporan palsu tersebut terkait kasus pembunuhan Vina di Polres Cirebon pada tahun 2016.

"Kami luruskan bahwa tidak ada istilahnya gelar perkara ulang. Yang dilakukan Bareskrim saat ini adalah gelar perkara awal," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Ditpidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta.

Djuhandhani juga mengimbau kepada masyarakat untuk mempercayakan mekanisme hukum yang berjalan mengingat terjadinya perseteruan antara pelapor dan terlapor. "Karena kalau kita lihat, sekarang sudah adu argumen di luar, padahal fakta penyidikan belum sama sekali kita dapatkan karena adanya laporan yang juga masih akan kita dalam. Mungkin saja

perbuatan itu ada, tapi penyidik harus membuktikan dan kita harus taat pada KUHAP," ucapnya.

Terkait laporan, Djuhandhani mengatakan saat ini Ditpidum Bareskrim Polri menerima dua laporan yang diajukan oleh pengacara enam terpidana dalam kasus Vina, yaitu laporan terhadap saksi Aep dan Dede serta terhadap Iptu Rudiana, ayah korban Eky. Adapun pada Selasa, penyidik menggelar gelar perkara awal untuk laporan terhadap Aep dan Dede. Berdasarkan pantauan, pengacara enam terpidana dalam kasus Vina selaku pihak pelapor dan pengacara saksi Dede selaku pihak terlapor, datang ke Gedung Bareskrim Polri pada pukul 13.00 WIB.

Salah satu pengacara enam terpidana, Roely Panggabean, mengatakan bahwa mereka akan memberikan bukti tambahan yang baru didapatkan beberapa hari lalu. "Kita akan serahkan buktinya dan apabila diperlukan, kami juga siap untuk menghadirkan bukti-bukti yang lain untuk membuktikan laporan kami bahwa Aep dan Dede telah memberikan keterangan palsu," katanya.

Sementara itu, salah satu pengacara Dede, Suhendra Asido Hutabarat, mengatakan akan memberikan keterangan terkait pernyataan Dede yang menyebut bahwa kesaksiannya dalam berita acara adalah tidak pernah terjadi.

(Ant/Has)-f

### PATOK HARGA MULAI RP 8 JUTA

## Bareskrim Tangkap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak

JAKARTA (KR) - Direktorat Tindak Pidana Siber (Ditpidisiber) Bareskrim Polri mengungkapkan modus yang digunakan oleh pelaku eksploitasi seksual anak di bawah umur secara daring. Para pelaku yang berinisial YM, MRP, CA, dan MIR menggunakan media sosial untuk mencari pelanggan dengan tujuan menawarkan jasa layanan seksual perempuan, mulai dari yang di bawah umur hingga selebritas yang disebut oleh pelaku 'skuter' atau selebritas kurang terkenal.

"Saudara MIR ini, selaku pelaku utama, adalah yang membuat akun di media sosial X, kemudian membentuk grup Telegram Premium Place," ungkap Wakil Direktur Tindak Pidana Siber (Ditpidisiber) Kombes

Pol Doni Kustoni dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/7).

Disebutkan, khusus untuk perempuan di bawah umur, para tersangka mematok harga antara Rp 8 - Rp 17 juta. Saat ini, jumlah anggota Telegram Premium Place sebanyak 3.200 anggota. Untuk bisa masuk ke dalam grup tersebut, para anggota harus membayar akses sebesar Rp 500.000 hingga Rp 2 juta.

Selain itu, pelaku juga menawarkan layanan khusus kepada anggota yang telah menjadi pelanggan loyal. Apabila pelanggan ini terus-menerus menggunakan layanan, maka mereka bisa bergabung dalam grup bernama 'Hidden Gems'. "Jadi, ada grup tersendiri dalam kelompok mereka yang memungkinkan untuk dimasuki

oleh loyal customer dengan membayar deposit Rp 5- 10 juta," beber Doni.

Di dalam grup 'Hidden Gems', lanjutnya, para pelaku menawarkan secara khusus perempuan-perempuan yang terbaik menurut mereka. Harga layanan yang dipatok berkisar ratusan juta. Adapun cara pelaku menawarkan korban adalah berawal dari media sosial. Apabila tertarik, pelanggan diarahkan untuk masuk dalam Telegram Premium Place dan diberikan katalog talent atau korban.

Selanjutnya, MIR menghubungi tersangka MRP yang berperan menyediakan talent untuk mengkomodasi permintaan pelanggan. Setelah transaksi selesai, korban diantarkan kepada pelanggan.

(Ant/Has)-d

**SALATIGA**  
Selamat & Sukses  
**HARI JADI KE-1274**  
**KOTA SALATIGA**  
Harmoni Dalam Berinovasi

**PEMERINTAH KOTA SALATIGA**  
Mengucapkan  
Selamat Hari Jadi Ke-1274  
**Kota Salatiga**  
Harmoni Dalam Berinovasi

**YASIP KHASANI, S.IP., M.M.**  
Pj. Wali Kota Salatiga

**KORAN MERAPI**  
Tuntas Tanpa Tendensi

**Kedaulatan Rakyat**  
Suara Hati Nurani Rakyat